

KINERJA APBD KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

DIDIK SUSETYO

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This research aimed to see the sequence level of “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” or local budget implementation based on effectiveness and efficiency, the growth of APBD, local finance capability indicators, and elasticity of local real income. Data used in this research was secondary data and panel data from 2004 until 2006 in ‘kabupaten/kota in South Sumatra. The analysis technique that used in this research were effectiveness, efficiency, the growth of estimate and realization, local finance capability, elasticity concept, and by using Kolmogorov Smirnov and Mann-Whitney Test.

The analysis result showed that Musi Banyuasin District has the first sequence level of “APBD” implementation, and Musi Rawas District has the last sequence level of “APBD” implementation. Elasticity of PAD to real income showed that Palembang City had elastic and the other ‘kabupaten/kota’ had inelastic. Meanwhile, the result of Kolmogorov Smirnov showed that was significance differences of “APBD” implementation among districts/cities in South Sumatera. The result of Mann-Whitney Test showed that was no significance differences of “APBD” implementation between districts/cities.

Key Words: APBD, performance, local real income, elasticity, district/city

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan terjadi beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan manajemen keuangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Konsepsi dan kewenangan daerah yang lebih mengacu pada porsi kebijakan pusat, akan bergeser dengan mengarah pada kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Perubahan ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi, bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga ke arah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang memiliki nilai-nilai pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencerminkan demokrasi, keterbukaan, kejujuran, keadilan yang berorientasikan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat (Koswara, 2000: 37). Berdasarkan hal ini maka sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tidak hanya terfokus pada pemerintah propinsi dan pusat (*vertical accountability*) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*horizontal accountability*).

Mengingat implementasi APBD yang merupakan salah satu alternatif stimulus untuk dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah, maka model

penyusunan APBD akan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran. Berkaitan dengan hal itu, bahwa sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang selama ini digunakan, belum mampu mendukung tuntutan perubahan, dengan demikian perlu suatu perencanaan APBD yang lebih sistematis, terstruktur dan komprehensif (Mardiasmo, 2001: 5).

Sebagai ilustrasi, untuk memahami salah satu indikator pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2006 dapat disimak rasio anggaran terhadap realisasi tahun 2006, seperti dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran APBD pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan sangat beragam. Anggaran dan realisasi APBD terbesar secara berturut-turut adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu, rasio realisasi terhadap anggaran pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2006

No	Kabupaten Kota	Tahun 2006		Rasio Realisasi Terhadap Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Palembang	976.165.811.722	848.524.986.892	86,92
2	Ogan Komering Ilir	881.933.093.300	873.916.789.500	99,09
3	Ogan Komering Ulu	1.065.030.212.884	1.033.610.946.135.07	97,09
4	Musi Rawas	902.442.781.200	897.472.149.300	99,45
5	Muara Enim	1.291.485.715.309	583.236.665.164	45,16
6	Musi Banyuasin	2.043.239.554.908	1.170.913.486.662	57,31
7	Lahat	583.247.242.800	521.019.024.400	89,33
8	Ogan Ilir	869.254.806.339	828.113.905.347	95,27
9	Ogan Komering Ulu Timur	979.594.389.572	879.143.816.860	89,75
10	Ogan Komering Ulu Selatan	276.653.968.041	333.433.231.445,6	120,52
11	Lubuk Linggau	39.897.953.863,3	36.848.788.534,9	92,36
12	Prabumulih	696.716.534.800	638.726.796.700	91,68
13	Banyuasin	406.992.360.100	288.058.458.900	70,78
14	Pagaralam	300.426.109.600	242.967.451.517	80,87

Sumber: Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumsel, 2005-2006 2006

Berdasarkan nilai rasio realisasi terhadap anggaran APBD tahun 2006, maka Kabupaten OKU Selatan merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami defisit. Ini dapat dilihat bahwa rasio realisasi APBD Kabupaten OKU Selatan terhadap anggarannya sebesar 120,52%, artinya realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih besar dari yang dianggarkan sebesar 120,52%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten OKU Selatan merupakan kabupaten baru, sehingga membutuhkan banyak dana untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayahnya. Sementara itu rasio realisasi terhadap anggaran terendah terdapat pada Kabupaten Muara Enim dengan nilai rasio sebesar 45,16%, disusul dengan Kabupaten Musi Banyuasin dengan nilai rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 57,31%. Rata-rata rasio realisasi APBD terhadap anggarannya di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan adalah sebesar 86,42%.

Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang penting, khususnya dalam era otonomi daerah. Kemampuan keuangan

dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Di sini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total APBD.

Selanjutnya, untuk mengukur respon peningkatan PAD terhadap kemajuan perekonomian daerah dapat diketahui keterkaitan antara salah satu komponen dalam APBD yaitu PAD dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Hubungan antara perkembangan PAD dengan PDRB, menunjukkan bahwa peningkatan PAD merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003; Susetyo, 1998). Daerah yang pertumbuhan ekonominya berkembang pesat mempunyai kemungkinan basis fiskal yang besar, terutama untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dalam peningkatan PDRB.

Dengan meningkatnya PDRB akan menambah basis fiskal sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah untuk pembiayaan program-program pembangunan. Selanjutnya, peningkatan pengeluaran pemerintah daerah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang juga diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kebutuhan evaluasi terhadap implementasi kinerja APBD yang pada beberapa indikator yaitu perkembangan APBD, efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan APBD, kemampuan keuangan daerah antar kabupaten/kota, dan elastisitas antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota, akan menjadi suatu informasi yang menarik dan berharga dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan menurut peringkat indikator perkembangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan daerah, dan elastisitas masing-masing kabupaten/kota.
2. Apakah terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan pemekaran dan non-pemekaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Musgrave (1959: 4) bahwa teori normatif atau teori optimal merupakan pendekatan teori anggaran yang sudah populer digunakan. Pendekatan dengan menggunakan teori normatif, dilakukan dengan menentukan sejumlah aturan dan prinsip dasar untuk mengatur anggaran. Untuk menentukan sejumlah aturan dan prinsip dalam aturan anggaran, Musgrave menambahkan bahwa sebelum aturan tersebut dibuat perlu diketahui reaksi pasar atas sejumlah aturan mengenai pajak dan kebijakan pengeluaran yang akan diberlakukan. Dengan mengetahui reaksi pasar yang akan terjadi, maka dapat dipilih kebijakan yang akan memberikan hasil paling optimal. Ada tiga tujuan dari kebijakan anggaran (Musgrave, 1959: 5), yaitu; (1) penyesuaian dalam alokasi sumberdaya; (2) Penyesuaian dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan; dan (3) Stabilisasi ekonomi.

Selanjutnya, teori normatif atau teori optimal berkaitan dengan anggaran seringkali disebut juga sebagai anggaran berimbang. Menurut Musgrave (1959: 23) terdapat beberapa prinsip dasar yaitu; (1). Jika terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja, kenaikan tingkat permintaan agregat akan menyebabkan terjadinya penyesuaian pengeluaran agregat sehingga

output akan dihasilkan pada kondisi *full employment*; (2). Jika terjadi kenaikan inflasi, maka pengurangan tingkat permintaan akan menyebabkan terjadinya penurunan output; (3). Jika kondisi yang berlaku adalah kondisi *full employment* dan tingkat harga stabil, maka tingkat pengeluaran agregat untuk mencegah pengangguran dan inflasi.

Sementara itu, pengertian APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat (Bana, 2001: 12).

Lebih lanjut, Mardiasmo (1999: 11) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tertuang dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan asli daerah, yaitu: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berkaitan dengan sistem dan tujuan pengelolaan APBD, Devas, *dkk.* (1989: 279) menyatakan bahwa pengelolaan meliputi beberapa hal:

- 1) Ketanggunganjawaban (*accountability*): pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan dan pengawasan;
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan: keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang);
- 3) Kejujuran: urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil;
- 4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah: tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya;
- 5) Pengendalian: petugas keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai.

Sementara itu, pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Devas, *dkk.* (1989: 279-280) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus

keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pemikiran lain yang sejalan oleh Jones (1995: 10) efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (*objectives*), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan keluaran. Suadi (1997: 7) efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan tujuan. Oleh karena itu suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci, sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna.

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD (Widodo, 1990: 76). Standar penilaian efektivitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria kinerja efektivitas keuangan.

Menurut Mardiasmo (2000: 43) bahwa efisiensi secara teoretis meliputi beberapa hal yaitu: (1) Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep *input output*, yaitu rasio dari *output* dan *input*; (2) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin; (3) Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*), dengan biaya (*input*) yang rendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten/Kota secara substansial kurang menggunakan unit *cost* atau indikator efisiensi jika dibandingkan dengan tipe ukuran yang lain, walaupun ukuran efisiensi sering dianggap penting untuk tujuan penganggaran (Poister dan Streib, 1999: 331-335). Menurut Baswir (1993: 176) bahwa rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi, artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Adapun faktor-faktor penentu efektivitas dan efisiensi menurut Mardiasmo (2000: 43) adalah sebagai berikut: (1) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana; (2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktural maupun fungsional; (3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas; (4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat; (5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.

Selanjutnya, salah satu indikator kinerja keuangan daerah adalah efisiensi. Efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Rumusan efisiensi yang akan dibahas sesuai dengan pendapat Widodo (1990: 78) yang menyatakan bahwa rasio realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah. Analisis efisiensi biaya penyusunan anggaran di sini termasuk perubahan dan perhitungan APBD. Adapun kriteria penilaian kinerja efisiensi keuangan yang mengacu kepada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996.

Indikator yang diamati selanjutnya adalah pertumbuhan anggaran daerah yang dilihat dengan cara membandingkan anggaran daerah tahun berjalan (*t*) dengan anggaran daerah tahun lalu (*t-1*). Perkembangan APBD dilihat dari empat indikator, yaitu pertumbuhan anggaran pendapatan, pertumbuhan realisasi anggaran, pertumbuhan anggaran belanja, dan pertumbuhan realisasi belanja. Formula pertumbuhan ini diadaptasi dari rumusan pertumbuhan ekonomi (BPS, 2006: 195).

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Di sini akan

lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total APBD. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio antara PAD dengan penerimaan daerah (Suparmoko, 1987: 42), di mana upaya desentralisasi di Indonesia diletakkan dalam kerangka sentralisasi (Kuncoro, 1995: 3-17). Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991: 42-47) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan, aparatur, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri atas aspek politik dan hukum. Formula yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Kaho, 1997: 124).

Selanjutnya, Istifadah (2001:1) melakukan penelitian tentang analisis pendapatan asli daerah terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PAD dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Surabaya dan menganalisis peran PAD Kota Surabaya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung PAD Surabaya mampu mempengaruhi besarnya transfer dana pembangunan dalam APBD Surabaya dan pengaruh tidak langsungnya adalah pada penurunan kegiatan pembangunan yang bersifat sektoral yang akan mempengaruhi nilai PDRB Kota Surabaya.

Evaluasi pelaksanaan APBD pernah diteliti oleh Petrus (2001: 31) tentang Perbandingan Evaluasi APBD Kabupaten Sikka dan Manggarai di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1995/1996–2000, menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka. Dari sisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka jauh lebih baik dengan nilai prosentase 9,45%, sedangkan Kabupaten Manggarai prosentase kemampuannya hanya sebesar 4,95%.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini akan membandingkan kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan akan dilihat dari beberapa indikator yaitu perkembangan APBD, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan daerah, dan elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber data berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan periode tahun anggaran 2004 sampai dengan 2007. Data sekunder ini merupakan hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan Negara/Daerah yang telah dipublikasi melalui internet.

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur beberapa indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan anggaran pendapatan dihitung berdasarkan rumus 1:

$$PA_{Pend} = ((JAP_t - JAP_{t-1})/JAP_t) \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- PA_{PEND} : Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota i
- JAP_t : Jumlah Anggaran Pendapatan tahun t
- JAP_{t-1} : Jumlah Anggaran Pendapatan tahun t-1

Rumus ini bisa diterapkan untuk pertumbuhan realisasi pendapatan, anggaran belanja, dan realisasi belanja (pengeluaran).

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD. Rumus efektivitas pengelolaan anggaran (Widodo, 1990: 76):

$$\text{Efektivitas} = (\text{Total Realisasi Pendapatan} / \text{Total Anggaran Pendapatan}) \times 100\% \dots (2)$$

Rumus efisiensi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah disajikan pada formula berikut:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Total Realisasi Pengeluaran} / \text{Total Realisasi Pendapatan}) \times 100\% \dots (3)$$

Formula yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan untuk mendukung otonomi daerah sebagai berikut:

$$\text{KKDt} = (\text{TPADt} / \text{TPDt}) \times 100\% \dots (4)$$

Keterangan:

KKD_t : kemampuan keuangan daerah tahun t

TPD_t : total pendapatan daerah tahun t

TBD_t : total belanja daerah tahun t

Elastisitas dihitung berdasarkan rumus persentase pertumbuhan PAD terhadap persentase pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan data panel 2004-2006 atau menggunakan regresi sederhana dengan logaritma natural (Ln) (Susetyo, 1998). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \text{persentase perubahan PAD} : \text{persentase perubahan PDRB} \dots (5)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Efektivitas pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan dilihat dari kemampuan pencapaian nilai realisasi pendapatan. Semakin besar nilai realisasi pendapatan yang dicapai, maka semakin efektif pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota tersebut. Efektivitas pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang diukur dengan rasio antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan seperti disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 maka tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori sangat efektif dan efektif, dengan nilai efektivitas berkisar antara 94,57% dan 127,45%. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang nilai efektivitasnya tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pendapatan pada Kabupaten Musi Banyuasin jauh melebihi targetnya.

Komponen pendapatan terbesar pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah komponen pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Pada APBD Tahun 2006, kontribusi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 96,22%. Pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, dana bagi hasil sumber daya alam merupakan penyumbang terbesar. Tercatat pada tahun 2006, dana bagi hasil sumber daya alam menyumbang 69,07% total dana perimbangan, serta sebesar 65,59% terhadap total pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin. Dominannya dana bagi hasil sumberdaya alam, dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berupa minyak bumi, dan gas alam.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Efektivitas Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2004-2006

No	Kabupaten/Kota	Efektivitas	Klasifikasi	Peringkat
1	Banyuasin	123,44	Sangat Efektif	2
2	Lahat	104,52	Sangat Efektif	10
3	Lubuk Linggau	104,96	Sangat Efektif	9
4	Muara Enim	105,71	Sangat Efektif	8
5	Musi Banyuasin	127,45	Sangat Efektif	1
6	Musi Rawas	116,06	Sangat Efektif	3
7	Ogan Ilir	103,67	Sangat Efektif	11
8	Ogan Komering Ilir	105,87	Sangat Efektif	7
9	Ogan Komering Ulu	106,97	Sangat Efektif	6
10	Ogan Komering Ulu Timur	98,17	Efektif	12
11	Ogan Komering Ulu Selatan	112,51	Sangat Efektif	4
12	Pagaralam	109,51	Sangat Efektif	5
13	Palembang	95,03	Efektif	13
14	Prabumulih	94,57	Efektif	14
	Rerata	107,75	Sangat efektif	

Sumber: Diolah dari data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kota Prabumulih merupakan kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai efektivitas terendah. Nilai efektivitas pelaksanaan APBD yang diukur dengan rasio realisasi terhadap pendapatan APBD pada Kota Prabumulih adalah sebesar 94,57%. Pada tahun 2006, komponen pada sisi pendapatan yang memiliki andil terbesar di Kota Prabumulih adalah komponen dana perimbangan. Kontribusi dana perimbangan pada tahun 2006 terhadap total pendapatan Kota Prabumulih adalah sebesar 94,41%. Penyumbang terbesar pada komponen dana perimbangan adalah dana hasil pajak/bukan pajak sebesar 48,64%, atau sebesar 45,92% terhadap total pendapatan Kota Prabumulih. Dana perimbangan yang besar ini juga disebabkan kekayaan sumberdaya alam berupa minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Kota Prabumulih.

Rata-rata efektivitas pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 107,75%. Nilai ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan berada pada tingkat sangat efektif. Komponen terbesar pada sisi pendapatan masing-masing kabupaten/kota adalah komponen dana perimbangan. Perbedaan yang mencolok terjadi pada struktur dana perimbangan, hal ini dikarenakan ada kabupaten kota yang memiliki sumbangan terbesar dari dana perimbangan hasil pajak/bukan pajak, tetapi juga terdapat kabupaten/kota yang memiliki sumbangan terbesar dari dana alokasi umum (DAU). Pada tahun 2006, selain Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki sumbangan terbesar dari dana bagi hasil sumberdaya alam, dan Kota Prabumulih yang memiliki sumbangan terbesar dari dana perimbangan hasil pajak/bukan pajak, komponen yang memiliki andil terbesar pada sisi pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Efisiensi Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pada Tabel 3 maka tingkat efisiensi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota, yang diukur dengan rasio antara realisasi total pengeluaran dan realisasi total

pendapatan menunjukkan pola yang beragam. Rasio efisiensi yang beragam ini menunjukkan pelaksanaan APBD yang berbeda pula pada setiap kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk pengeluaran, tetapi ada kabupaten/kota yang mengalokasikan semua pendapatannya untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Terdapat tiga kabupaten/kota dalam kategori efisien, lima kabupaten/kota cukup efisien, dan enam kabupaten/kota tergolong kurang efisien.

Tabel 3. Nilai Rata-rata Efisiensi Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2004-2006

No	Kabupaten/Kota	Efisiensi	Klasifikasi	Peringkat
1	Banyuasin	77,74	Efisien	3
2	Lahat	86,15	Cukup Efisien	5
3	Lubuk Linggau	91,00	Kurang Efisien	9
4	Muara Enim	91,36	Kurang Efisien	10
5	Musi Banyuasin	84,93	Cukup Efisien	4
6	Musi Rawas	99,60	Kurang Efisien	14
7	Ogan Ilir	89,88	Cukup Efisien	8
8	Ogan Komering Ilir	95,17	Kurang Efisien	11
9	Ogan Komering Ulu	87,29	Cukup Efisien	6
10	Ogan Komering Ulu Timur	96,38	Kurang Efisien	12
11	Ogan Komering Ulu Selatan	87,41	Cukup Efisien	7
12	Pagaralam	74,03	Efisien	1
13	Palembang	96,43	Kurang Efisien	13
14	Prabumulih	77,53	Efisien	2

Sumber: Diolah dari data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Nilai efisiensi terendah terdapat pada Kota Pagaralam dengan nilai 74,03%. Rendahnya nilai efisiensi pada Kota Pagaralam dalam kurun waktu 2004-2006 dikarenakan rendahnya nilai efisiensi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 nilai efisiensi pelaksanaan APBD Kota Pagaralam adalah sebesar 43,69%. Nilai ini menunjukkan tidak sampai dari 50% pendapatan yang diterima oleh Kota Pagaralam digunakan untuk membiayai belanjanya.

Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada Kabupaten Musi Rawas dengan nilai efisiensi sebesar 99,60%. Tingginya rasio efisiensi di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 2004-2006 menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas kurang memperhatikan prinsip penghematan pengeluaran. Semua pendapatan yang ada cenderung untuk dihabiskan sebagai pengeluaran. Pada tahun 2006 struktur pengeluaran pada Kabupaten Musi Rawas didominasi jenis pengeluaran aparatur daerah sebesar Rp 247.187.680.960 atau 67,08% dari total pengeluaran Kabupaten Musi Rawas (data APBD terlampir). Dalam realisasi pengeluaran aparatur daerah, kontribusi terbesar berasal dari pengeluaran administrasi umum sebesar Rp 212.550.967.481 atau 85,99% dari total pengeluaran aparatur daerah atau sebesar 57,68% dari total pengeluaran Kabupaten Musi Rawas. pengeluaran administrasi umum mencakup pengeluaran pegawai/personalia, pengeluaran barang dan jasa, pengeluaran perjalanan dinas, serta biaya pemeliharaan. Dari keempat komponen ini, maka pengeluaran pegawai/personalia yang memiliki porsi terbesar, yaitu sebesar 66,47% dari total pengeluaran administrasi umum, atau sebesar 38,34% dari total pengeluaran Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menjelaskan bahwa sepertiga dari APBD Kabupaten Musi Rawas digunakan untuk keperluan pengeluaran pegawai.

Hasil yang menarik dapat dilihat dari efisiensi kabupaten/kota yang mengalami pemekaran. Kabupaten/kota yang merupakan hasil pemekaran adalah Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sudah sewajarnya kabupaten/kota yang mengalami pemekaran memiliki nilai efisiensi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan pada daerah pemekaran keberadaan infrastruktur, sarana dan prasana yang diperlukan untuk kegiatan operasional pemerintah, masih relatif terbatas. Sehingga kabupaten/kota pemekaran memerlukan biaya pembangunan daerah yang relatif lebih besar dari daerah-daerah lainnya. Selain itu, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam bentuk APBD juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota pemekaran. Dari ke tujuh kabupaten/kota hasil pemekaran, hanya Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki nilai rasio efisiensi tinggi.

Nilai efisiensi Kota Lubuk Linggau adalah sebesar 91%. Bagian pada struktur pengeluaran Kota Lubuk Linggau yang memiliki andil terbesar terhadap total pengeluaran Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2006 (data APBD terlampir) adalah pengeluaran Pelayanan Publik. Kontribusi bagian pengeluaran pelayanan publik pada total pengeluaran Kota Lubuk Linggau 72,41%. Pada pengeluaran pelayanan publik, pengeluaran modal memiliki porsi terbesar yaitu sebesar 31,27%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sepertiga pengeluaran Kota Lubuk Linggau dialokasikan untuk pengeluaran modal.

Perkembangan APBD Kabupaten/Kota

Pada indikator perkembangan APBD Kabupaten/Kota terdapat empat sub indikator yaitu indikator pertumbuhan anggaran pendapatan, pertumbuhan realisasi pendapatan, pertumbuhan anggaran pengeluaran, dan pertumbuhan realisasi pengeluaran. Pertumbuhan anggaran dan realisasi APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Anggaran & Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2005-2006

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan		Belanja	
		Anggaran (%)	Realisasi (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Banyuasin	30.7	29.27	6.86	17.76
2	Lahat	8.41	8.95	9.2	7.86
3	Lubuk Linggau	22.27	24.58	23.4	24.08
4	Muara Enim	13.7	19.23	17.45	13.83
5	Musi Banyuasin	20.32	11.57	29.82	76.03
6	Musi Rawas	0.37	7.87	1.15	2.29
7	Ogan Ilir	24.37	23.92	25.83	25.97
8	Ogan Komering Ilir	7.66	5.32	3.74	7.62
9	Ogan Komering Ulu	10.87	7.89	24.32	18.87
10	Ogan Komering Ulu Selatan	28.95	21.23	20.43	17.75
11	Ogan Komering Ulu Timur	27.59	23.61	28.77	27.21
12	Pagaralam	32.21	-11.36	19.44	23.43
13	Palembang	15.6	17.87	17.39	14.79
14	Prabumulih	7.76	10.94	12.11	6.59

Sumber: Diolah dari data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat pertumbuhan anggaran dan realisasi baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran. Pertumbuhan anggaran dan realisasi baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat beragam. Selanjutnya pertumbuhan anggaran dan realisasi pada pendapatan maupun

pengeluaran akan diurutkan dan diklasifikasikan dalam kelompok pertumbuhan tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Pertumbuhan anggaran pendapatan pada kabupaten/kota mengisyaratkan peningkatan target pendapatan yang harus dicapai pada tahun berjalan. Peningkatan jumlah anggaran pendapatan yang ditargetkan dapat dicapai akan berpengaruh terhadap rencana pengeluaran daerah yang akan dilakukan.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tersebut. Semakin tinggi nilai rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka semakin baik kemandirian keuangan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai indikator dalam rasio kemampuan keuangan daerah dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan. Pada Tabel 5 disajikan data mengenai kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa selain Kota Palembang, maka kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Palembang masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada struktur pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan kurang dari 10 persen.

Tabel 5. Rata-Rata Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2004 – 2006

No	Kabupaten/Kota	KKD	Klasifikasi	Peringkat
1	Banyuasin	2,15	Sangat Kurang	11
2	Lahat	4,63	Sangat Kurang	4
3	Lubuk Linggau	4,47	Sangat Kurang	3
4	Muara Enim	7,03	Sangat Kurang	2
5	Musi Banyuasin	2,31	Sangat Kurang	9
6	Musi Rawas	2,06	Sangat Kurang	12
7	Ogan Ilir	2,69	Sangat Kurang	8
8	Ogan Komering Ilir	3,73	Sangat Kurang	7
9	Ogan Komering Ulu	4,40	Sangat Kurang	5
10	Ogan Komering Ulu Timur	2,00	Sangat Kurang	13
11	Ogan Komering Ulu Selatan	1,52	Sangat Kurang	14
12	Pagaralam	2,19	Sangat Kurang	10
13	Palembang	10,53	Kurang	1
14	Prabumulih	4,33	Sangat Kurang	6

Sumber: Diolah dari data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Ket: KKD adalah Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Palembang merupakan satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Selatan yang kemampuan keuangan daerahnya berada dalam kategori kurang (memiliki rangking tertinggi). Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 10,53%. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebagai salah satu bagian penting dalam struktur

pendapatan Kota Palembang pada tahun 2006 menyumbang andil sebesar 10,06% terhadap total pendapatan Kota Palembang. Ini berarti hanya 10% pengeluaran daerah Kota Palembang yang mampu dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Berdasarkan analisis mengenai efisiensi pelaksanaan APBD, maka Kota Palembang termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rasio realisasi pengeluaran terhadap realisasi anggaran sebesar 96,43% (peringkat 1).

Evaluasi Kinerja APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat kinerja empat indikator evaluasi pada masing-masing kabupaten/kota. Keempat indikator tersebut adalah efektivitas, efisiensi, perkembangan anggaran, dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi atas beberapa indikator yang digunakan, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi Anggaran Pendapatan dan pengeluaran Daerah yang dilakukan. Sementara itu, Kabupaten Musi Rawas berada peringkat terendah atas evaluasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah yang dilakukan.

Tabel 6. Peringkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah, 2006

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Pada Masing-Masing Indikator	Peringkat
1	Banyuasin	38	3
2	Lahat	62	11
3	Lubuk Linggau	39	4
4	Muara Enim	53	8
5	Musi Banyuasin	31	1
6	Musi Rawas	83	14
7	Ogan Ilir	41	5
8	Ogan Komering Ilir	76	3
9	Ogan Komering Ulu	48	7
10	Ogan Komering Ulu Timur	59	9
11	Ogan Komering Ulu Selatan	37	2
12	Pagaralam	43	6
13	Palembang	60	10
14	Prabumulih	66	12

Sumber: Diolah berdasarkan data pada tabel-tabel sebelumnya.

Selanjutnya, dengan menggunakan nilai standar deviasi, maka kesenjangan tertinggi atas setiap indikator evaluasi Anggaran Pendapatan Dan pengeluaran Daerah terjadi pada kelompok kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbedaan yang nyata atas indikator yang evaluasi antarkabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

Elastisitas pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merupakan rasio sensitivitas, perubahan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah akan perubahan pertumbuhan ekonomi pada

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah akan mengukur tingkat elastisitas perubahan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota jika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota tersebut. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2006

No	Kabupaten	2004	2005	Rerata
1	Banyuasin	0.19	0.08	0.14
2	Lahat	0.18	0.17	0.17
3	Lubuk Linggau	0.36	0.31	0.33
4	Muara Enim	0.21	0.21	0.21
5	Musi Banyuasin	0.07	0.10	0.08
6	Musi Rawas	0.86	0.73	0.80
7	Ogan Ilir	0.68	0.48	0.58
8	Ogan Komering Ilir	0.39	0.34	0.37
9	Ogan Komering Ulu	0.65	0.66	0.65
10	Ogan Komering Ulu Timur	0.51	0.39	0.45
11	Ogan Komering Ulu Selatan	0.43	0.41	0.42
12	Pagaralam	0.08	0.07	0.07
13	Palembang	1.82	1.55	1.68
14	Prabumulih	0.22	0.17	0.19
Rata-rata Provinsi		0.48	0.40	0.44

Sumber: diolah

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa elastisitas Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan bernilai lebih dari satu. Nilai ini menyatakan bahwa perubahan Pendapatan Asli Daerah berbanding lurus dengan perubahan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2004-2005 rata-rata nilai elastisitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan di bawah satu atau lebih mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi relatif inelastis atau tidak sensitif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang, angka elastisitas pendapatan asli daerahnya bersifat inelastis. Elastisitas terbesar dimiliki Kota Palembang. Nilai elastisitas Pendapatan Asli Daerah pada Kota Palembang adalah sebesar 1,68. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah pada Kota Palembang bersifat elastis atau sensitifitas yang tinggi dari Pendapatan Asli Daerah jika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi.

Hasil Kolmogorov-Smirnov Test Perbedaan Kinerja APBD Antar kabupaten/kota

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi kinerja pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasil ini menegaskan bahwa analisis dengan menggunakan nilai standar deviasi ini juga mengungkapkan terdapatnya perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Hasil Mann-Whitney Test Perbedaan Pelaksanan APBD Kabupaten dan Kota

Hasil uji Mann-Whitney menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara evaluasi kinerja pelaksanaan APBD kabupaten dengan kota dan juga pelaksanaan kinerja APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan antara daerah pemekaran dan non-pemekaran.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis bahwa peringkat kabupaten/kota berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, perkembangan APBD, dan kemampuan keuangan daerah, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik, sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Rata-rata elastisitas pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2004-2005 adalah 0,44. Nilai ini mengindikasikan bahwa elastisitas pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota bersifat inelastis. Kondisi ini juga terjadi pada semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kecuali Kota Palembang bersifat elastis (1,68) artinya elastisitas pendapatan asli daerah sangat responsif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil uji-beda Kolmogorov-Smirnov secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Namun, berdasarkan Mann-Whitney Test secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD antara kabupaten dengan kota dan tidak terdapat perbedaan kinerja pelaksanaan APBD kabupaten/kota antara daerah pemekaran dengan non-pemekaran.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD kabupaten/kota hendaknya dapat dijadikan bahan koreksi dan masukan untuk pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Hendaknya kabupaten/kota lainnya dapat mencontoh elastisitas Kota Palembang. Evaluasi kinerja pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Sumatera Selatan agar ditingkatkan untuk mencapai kriteria wajar tanpa pengecualian (WTP).

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Baswir, R., 1993, *Ekonomika Manusia dan Etika*, Edisi ke I, BPFE, Yogyakarta.
- Depdagri RI, 1997, Kepmendari Nomor 690.900.327 Tahun 1996, *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*, Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Istifadah, Nurul. (2001). *Analisis Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Surabaya dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Keuangan*. Abstrak Tesis Universitas Airlangga, (<http://digilib.unair.ac.id>, diakses 4 Desember 2006).
- Jones, Bernard, 1995, *Local Government Financial Management*, ICSA, Pub. Ltd.
- Kaho, Riwu J., 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali-Press, Jakarta.
- Mardiasmo, 1999, “*Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*”, Makalah pada National Seminar Promoting Good Governance, PAU–SE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001, *Paper Seminar Program MEP/HIMMEP*, UGM, Yogyakarta.
- _____, 2001, “Budgetary Slack Resulted From the Effects of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government Budget: The Case of Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, p. 56.
- Medi, S., 1996, “Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur”, *Tesis S-2*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
- Miller, Stephen M. and Frank S. Russek, 1997, “Fiscal Structures and Economic Growth at the State and Local Level”, *Public Finance Review*, Vol. 25, No. 2, 213 – 237.

- Musgrave, R. A., 1959, *The Theory of Public Finance*, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd.
- Odedokun, M.O., 1996, "Financial Policy and Efficiency of Resource Utilization in Developing Countries", *Growth and Change*, Vol. 27, 264 – 297.
- Petrus, Dasilva, 2001, *Perbandingan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sikka dan Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Tesis S2 (tidak dipublikasikan)
- Poister, TH. Streib, G., 1999, "Performance Measurement in Municipalities Government, Assesing State of the Practice", *Public Administration Review*, Vol. 59. No. 4, 324 – 335.
- Sabeni, Arifin – Imam Ghozali, 1995, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 3, BPFE – Yogyakarta.
- Suadi, Arif, 1997, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE – Yogyakarta.
- Susanti, Hera, dkk.2000. *Indikator-indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Susetyo, Didik, 1998. "Analisis Kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Dati II di Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Sriwijaya*, Nomor 2 (I), Mei 1998, Fakultas Ekonomi Unsri.
- , 2001. "Reformasi Kebijakan Fiskal: Adakah Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2 (I), Mei 2001, Fakultas Ekonomi Unsri.
- , 2003. "Fiscal Need and Fiscal Capacity in Atonomy Era: Empirical Study of Local Public Finance of Kabupaten/Kota in Indonesia", *Economic Journal*, Vol XVIII, No. 2, September, Faculty of Economic Padjadjaran University, Bandung.
- Wahyudi, Sri Agustinus, 1996, *Manajemen Strategik - Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Widodo, Hg. Tryanto, 1990, *Indikator Ekonomi*, Cetakan ke-10, Kanisius, Yogyakarta.
- Zahari, M.. 2001. Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang (tidak dipublikasikan).